BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sasaran pembangunan Daerah Riau mengacu kepada Lima Pilar Utama, yaitu: 1) pembangunan ekonomi berbasis kerakyatan; 2) pembinaan dan pengembangan sumberdaya manusia; 3) pembangunan kesehatan/ olahraga; 4) pembangunan/kegiatan seni budaya; dan 5) pembangunan dalam rangka meningkatkan iman dan taqwa. Pembangunan ekonomi kerakyatan akan difokuskan kepada pemberdayaan petani terutama di pedesaan, nelayan, perajin; dan pengusaha industri kecil. Untuk menunjang kelima pilar pembangunan tersebut pemerintah daerah Riau juga melaksanakan pembangunan dibidang lain yaitu: transportasi, irigasi, dan pembangunan sarana dan prasarana pemukiman. Pembangunan daerah Kabupaten Indragiri Hulu tidak terlepas dari kelima pilar utama pembangunan daerah Riau.

Dari sisi lain perkembangan perekonomian di Kabupaten Indragiri Hulu tidak dapat dilepaskan dari peranan dunia usaha yang ada, baik skala kecil maupun skala besar. Jumlah dunia usaha relatif lebih banyak yang keberadaannya tersebar ke seluruh wilayah, sekalipun dalam distribusinya kurang menyebar di Kabupaten Indragiri Hulu.

Pengembangan dunia usaha di Kabupaten Indragiri Hulu lebih diarahkan kepada peningkatan kemampuan, baik secara kelembagaan

maupun dalam operasionalisasinya serta pengembangan investasi yang mengarah kepada sektor-sektor riil dan menyangkut hayat hidup orang banyak.

Program ekonomi masyarakat yang berbasis kerakyatan yang sedang dikembangkan di Kabupaten Indragiri Hulu harus terus didukung. Karena program ini sudah menjadi program pemerintah mulai dari pusat, propinsi sampai kepada kabupaten/kota. Program ini dapat meningkatkan dan mengembangkan dunia usaha.

Selain itu pengembangan dunia usaha di Kabupaten Indragiri Hulu diharapkan dapat membangkitkan pertumbuhan ekonomi, dan tentunya dengan pengembangan dunia usaha ini dapat meningkatkan pendapatan masyarakat.

Ditinjau dari badan usaha yang berjalan selama ini, ada tiga kelompok pelaku bisnis dalam sistem perekonomian nasional, yaitu: badan usaha milik Negara (BUMN), badan usaha milik swasta (BUMS), dan badan usaha koperasi (BUK). Dari ketiga pelaku bisnis tersebut yang sesuai dengan pasal 33 UUD 1945 azas usaha bersama dan kekeluargaan adalah koperasi. Hal ini terlihat pada tujuan koperasi, yaitu memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur.

Keberadaan koperasi di Indonesia merupakan amanat konstitusi yang termuat dalam UUD 1945 pasal 33 ayat 1. Penjelasannya menyatakan kegiatan usaha yang sesuai dengan butir tersebut adalah koperasi. Koperasi

adalah lembaga ekonomi rakyat yang turut menggerakkan perekonomian. Pertumbuhan dan perkembangan usahanya dari waktu ke waktu perlu selalu ditingkatkan sehingga koperasi menjadi bagian yang kokoh dan penting dalam perekonomian nasional.

Koperasi merupakan organisasi masyarakat yang memungkinkan dapat memobilisasi sumberdaya bagi kepentingan pembangunan, oleh karena itu koperasi diharapkan dapat berperan sebagai sokoguru perekonomian nasional.

Memasuki millennium ketiga, dimana persaingan usaha bersifat menyeluruh (global) dan ketat, mau tidak mau setiap pelaku ekonomi yang ingin tumbuh dan berkembang tak terkecuali koperasi harus memiliki daya saing. Koperasi merupakan organisasi swadaya (*self-help organization*) yang dibangun berdasarkan azas sukarela (*voluntary*), dengan keanggotaan yang bersifat terbuka (*open membership*), serta kegiatannya diatur, dibiayai, dan dikontrol oleh, dari dan untuk anggota. Karena menyangkut dengan kepentingan sebaran besar masyarakat khususnya golongan ekonomi lemah, koperasi dapat menjadi penggerak perekonomian nasional. Koperasi sebagai badan usaha atau perusahaan tidak berorientasi laba (*profit oriented*) semata, melainkan orientasi manfaat (*benefit oriented*). Koperasi sebagai badan usaha memiliki kemampuan kompetitif terutama karena koperasi mempunyai potentiu untuk menciptakan *economies of scale* sehingga mampu menekan biaya (biaya rendah), di samping itu koperasi memiliki posisi tawar (*bargaining position*) di pasar.

Keunggulan komparatif dilihat dari sudut pandang keanggotaannya hanya dapat direalisasikan oleh individu-individu anggota, jika mereka memiliki sumberdaya yang memadai. Faktor sumberdaya manusia merupakan factor penentu dalam pencapaian keberhasilan koperasi, karena kualitas sumberdaya yang memadai akan berpengaruh kepada sikap dan perilaku pengelola dan para anggota itu sendiri. Kemampuan organisasi koperasi untuk mencapai keberhasilan sangat tergantung kepada kerjasama pribadi semua anggota, pengurus, dan kelembagaan usaha koperasi. Keterikatan ketiga komponen ini dalam koperasi bersifat timbale balik. Para anggota akan terus mempertahankan keanggotaannya dan akan berpartisipasi apabila mereka memperoleh manfaat dari koperasinya. Bagi pihak manajemen keuntungan yang diperoleh dengan adanya partisipasi anggota akan memotivasi untuk meningkatkan jasa pelayanan perusahaan koperasi disesuaikan dengan perkembangan kebutuhan anggota.

Koperasi yang sehat dan kuat akan terwujud apabila terdapat sumberdaya manusia yang mampu mengembangkan koperasi, karena manusia merupakan dimensi yang penting dalam perbaikan kualitas dan produktivitas perusahaan koperasi. Agar anggota di dalam koperasi dapat efisien dan efektif, maka perlu promosi kesejahteraan anggota (*promotion of members welfare*) melalui peningkatan manajemen keanggotaan.

Mengabaikan fungsi-fungsi operasional manajemen keanggotaan dalam suatu koperasi berarti mengabaikan misi dan fungsi yang diemban oleh koperasi tersebut. Hal ini dikarenakan posisi tawar (*bargaining position*) mereka ditentukan oleh kebersamaan mereka sebagai anggota koperasi.

Dasar-dasar kerjasama bukan persaingan antar anggota, melainkan persamaan kepentingan.

Keberhasilan anggota koperasi tidak bias lepas dari fungsi-fungsi operasional manajemen keanggotaan, karena fungsi-fungsi operasional manajemen keanggotaan koperasi bertujuan memberdayakan usaha-usaha anggota agar berfungsi secara penuh di dalam kedudukannya sebagai pemilik maupun sebagai pelanggan. Akibat peran ganda anggota, maka partisipasi dalam koperasi dapat berupa partisipasi kontributif dan partisipasi insentif. Kontribusi anggota bagi pertumbuhan koperasi dalam bentuk sarana keuangan seperti simpanan (pokok, wajib, dan sukarela).

Koperasi merupakan wadah untuk mengembangkan demokrasi yang menghimpun potensi pembangunan dan melaksanakan kegiatan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan anggota-anggotanya. Koperasi berfungsi sebagai alat perjuangan ekonomi yang mampu mengelola perekonomian rakyat untuk memperkokoh kehidupan ekonomi nasional berdasarkan azas kekeluargaan.

Usaha pengembangan ekonomi pedesaan diharapkan berkaitan sangat erat dengan kegiatan koperasi, khususnya KUD, agar nilai tambah yang diterima oleh anggota dapat dinikmati oleh masyarakat pedesaan (petani dan masyarakat lainnya), sebagai anggota koperasi. Koperasi sangat berperan dalam perekonomian di pedesaan. Dalam strategi pengembangannya, koperasi masih harus memantapkan bidang usaha sendiri. Keberhasilannya dapat dirasakan secara nyata oleh para anggotanya. Para anggota dapat mengukur seberapa jauh pengembangan

itu telah berhasil meningkatkan kesejahteraan rakyat. Perhatian pemerintah yang besar dalam membantu pemasaran hasil pertanian ditunjukkan oleh dukungannya mengaitkan kegiatan koperasi dalam setiap usaha yang mengarah pada pengembangan agribisnis. Walaupun hambatan banyak ditemui, namun dalam proses pelaksanaannya harus dilalui dan ditanggulangi untuk mewujudkan kesejahteraan yang dapat dirasakan oleh semua pihak.

Dari apa yang digambarkan di atas, maka untuk memajukan ekonomi di daerah sebagai percepatan pembangunan ekonomi yang berbasis kerakyatan, maka perlu dikembangkan koperasi sebagai sokoguru perekonomian masyarakat. Berkembangnya koperasi di daerah diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pembangunan ekonomi di daerah dan sekaligus meningkatkan ekonomi di daerah pedesaan. Untuk itu perlu dilakukan suatu kajian yang dapat memberikan masukan untuk kebijakan pengembangan koperasi di daerah Kabupaten Indragiri Hulu.

1.2 Tujuan

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah, antara lain:

- a. Mengidentifikasi koperasi dan usaha ekonomi yang ada di Kabupaten Indragiri Hulu.
- b. Menyusun rencana strategis pengembangan dunia usaha melalui koperasi untuk percepatan peningkatan ekonomi daerah.

1.3 Keluaran Diharapkan

Setelah penelitian ini dilakukan, diharapkan dapat memberikan masukan kepada pelaku-pelaku bisnis dan pembuat kebijakan pada tingkat kabupaten, antara lain:

- a. Pemerintah daerah, tersedianya data tentang koperasi, usaha kecil dan menengah, dan jenis usaha ekonomi di Kabupaten Indragiri Hulu.
- b. Pemberdayaan koperasi untuk percepatan ekonomi daerah, dan mencari solusi bagi usaha melalui koperasi yang lebih menguntungkan sehingga mampu berkembang.
- c. Pemodal, dapat memberikan gambaran usaha yang paling menguntungkan atau menjanjikan sehingga dapat menjadi mitra usaha.